

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN
RISIKO *INDEPENDEN (SEPARATE RISK MANAGEMENT COMMITTEE)*
PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI**

Andalan Tri Ratnawati

Setyobudi

Fakultas Ekonomi UNTAG Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Semarang

Andalan_yara@yahoo.com

setiyobudi_pati@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidenceregarding the factors that affect the existence of the Separate Risk Management Committee (SRMC), which includes the independent commissioner, board size, auditor reputation, The company complexity, financial reporting risk, leverage and firm size of the existence of SRMC, the company non banking a listing on the Indonesia Stock Exchange.

The population in this study were non banking company which listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2009-2011. Based on purposive sampling method, the number of samples in this study of 255. Testing hypotheses using regression analysis Logistics.

Logistics regression analysis found that there was a board size significant impact on SRMC and the effect of firm size has positive and significant impact on the SRMC non banking companies listed on the BEI. The proportion of independent board, auditor reputation, financial reporting risk, complexity, and leverage does not effect the existence of RMC and the SRMC on non banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

Keywords : Independent Commissioner, Board Size, Auditor Reputation, Complexity, Financial Reporting Risk, Leverage, Firm Size, RMC and SRMC

PENDAHULUAN

Penerapan *Good corporate governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. (Andalan, 2012)

Perkembangan komite manajemen risiko (*Risk Mamagement Committee / RMC*) mulai meningkat. seiring dengan perkembangan kebutuhan untuk melaksanakan pengelolaan usaha berdasarkan praktek-praktek terbaik dengan berdasarkan pada prinsip TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsible, Independent, Fairness*). Pemerintah mulai menerapkan pembentukan Komite Manajemen Risiko atau RMC pada industri perbankan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003, mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada tahun 2011 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/23.PBI/2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan manajemen risiko pada BUS dan UUS disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta

kemampuan BUS dan UUS. Namun pembentukan RMC pada sektor industri lainnya di Indonesia masih bersifat sukarela.

Motivasi pokok dilakukannya penelitian ini adalah meskipun pemberlakuan *Risk Management Committee* (RMC) akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan, namun saat ini masih sedikit bukti yang dapat ditemukan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keberadaan RMC. Dalam penelitian (Subramaniam, *et al*, 2009) menunjukkan hasil bahwa lebih dari separuh yaitu 54% organisasi atau perusahaan yang menjadi responden telah memiliki atau memberlakukan RMC. Perusahaan yang telah memiliki atau memberlakukan RMC, 70 persen perusahaan mengintegrasikan RMC dengan komite audit dewan komisaris. Akan tetapi, temuan dari penelitian ini masih terlalu deskriptif; kurang memuat informasi tentang faktor-faktor yang menentukan keputusan perusahaan untuk memberlakukan RMC dan untuk mengungkapkan adanya RMC tersebut dalam laporan tahunan.

Selanjutnya, karena kajian manajemen risiko biasanya memerlukan pemahaman yang signifikan tentang struktur dan proses organisasi yang sangat rumit, maka masuk akal kiranya jika para pengamat berpendapat bahwa RMC yang terpisah atau independen (SRMC), cenderung lebih efisien dibandingkan RMC yang tergabung atau terintegrasi dengan komite audit (Ruigrok *et al*, 2006). Terlepas dari hasil pengamatan ini, masih sedikit bukti empiris tentang hubungan *corporate governance* maupun karakteristik perusahaan dengan keputusan perusahaan untuk membentuk SRMC yang terpisah dari komite RMC. Tidak diragukan

bahwa pemahaman tentang determinan RMC sangat penting karena pemerintah menuntut perusahaan yang terdaftar untuk memberitahukan praktek-praktek *corporate governance* di dalam laporan tahunan dengan penjelasan yang jelas dan transparan.

Anggota SRMC diharapkan memberi masukan kepada manajemen senior tentang kondisi manajemen risiko perusahaan, memeriksa kelayakan dan manajemen prosedur risiko, dan melaporkan temuan kepada dewan komisaris. SRMC dapat menjadi sebuah mekanisme yang efektif di dalam mendukung tugas dewan komisaris secara penuh guna memenuhi tanggung jawab pemeriksaan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal. SRMC yang anggotanya terdiri atas komisaris independen dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan bidang manajemen risiko akan semakin mampu dalam mendukung *corporate governance* melalui analisis yang mendalam dan detil tentang pemeriksaan risiko dan pengendalian internal. Peran SRMC di dalam mendukung *corporate governance* akan sangat penting kedudukannya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antar pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Teori agensi memuat premis teoretikal untuk memahami proses dan desain organisasi dari sudut pandang atasan-bawahan (*principal-agent*) (Subramaniam, 2006). Pembentukan Komite Manajemen

Risiko (*Risk Management Committee*) di perusahaan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh dewan komite untuk mengurangi dampak biaya keagenan dan mengelola risiko yang akan terjadi. Pengelolaan risiko ini, memerlukan perhatian khusus bagi manajemen untuk mengatasi risiko yang terdapat pada berbagai jenis perusahaan baik *financial* atau *non financial*. Dewan komisaris menggunakan perangkat pengawasan umum internal yaitu monitoring dewan direksi dan mekanisme monitoring eksternal (Subramaniam, 2006).

Penggunaan teori agensi telah sering dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu tentang komite dewan komisaris seperti komite audit, remunerasi dan nominasi (Ruigrok *et al*, 2006; Benz dan Frey, 2007). Secara umum, komite dewan pengawas dianggap mampu menjalankan pengawasan mutu yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi perilaku *oportunistik* oleh manajer. Komite dewan seperti ini selanjutnya diprediksikan muncul di dalam situasi di mana biaya agensi tinggi, misalnya leverage tinggi dan ukuran perusahaan yang semakin besar dan semakin kompleks. Selain itu, teori agensi juga menyimpulkan bahwa karakteristik dewan seperti independensi dan keberadaan ketua yang independen merupakan faktor yang potensial mempengaruhi struktur dewan komisaris (Chau dan Leung, 2006; Carson, 2002;). Akan tetapi, teori agensi cenderung memfokuskan perhatian pada motive-motive perilaku manusia, khususnya dari kepentingan sendiri dan mengabaikan alasan-alasan lain yang dapat membimbing keputusan organisasi. Sebagai contoh, keputusan organisasi dapat pula diambil

untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma institusional atau untuk menjawab tekanan dari *stakeholders* tertentu, sehingga dapat mendukung legitimasi organisasi.

2.2. Struktur Dewan di Indonesia

Struktur dewan dalam perusahaan di Indonesia menganut sistem dua tingkat (*two-tiers system*) yang menganut sistem hukum kontinental Eropa. Perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu Dewan Komisaris (dewan pengawas) dan Dewan Direksi (dewan manajemen/eksekutif). Dewan Direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarah dan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen serta tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder (www.cic.fegi.org). Dewan Komisaris inti dari *Good Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Prinsip dasar Dewan Komisaris menurut (KNKG, 2006), adalah

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

2.3. Komite Manajemen Risiko/*Risk Managemen Committee* (RMC)

Komite Manajemen Risiko adalah perangkat Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dalam bidang pemantauan dan *mitigasi* risiko perusahaan. Komite Manajemen Risiko (*Risk Managemen Committee* / RMC) adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Muncul pendapat bahwa baik kualitas aktual maupun kualitas yang didapatkan dari pengawasan internal terkait dengan manajemen risiko, cenderung lebih tinggi jika perusahaan telah memiliki RMC. Tidak jauh berbeda, muncul harapan bahwa kualitas aktual dan kualitas yang didapatkan dari pengawasan internal yang terkait dengan manajemen risiko akan lebih tinggi jika RMC terpisah atau independen, bukan merupakan bagian atau gabungan dari komite lain.

Rasionalisasi di atas dikemukakan berdasarkan dua alasan pokok berikut ini:

- a. Manajemen risiko merupakan sebuah proses yang kompleks pengidentifikasian, pengelolaan, pengawasan dan pengurangan risiko bisnis. Sehingga dengan memiliki RMC perusahaan akan

semakin mampu mengarahkan dewan direksinya untuk secara lebih efektif terlibat di dalam penilaian berbagai ancaman dan peluang yang dihadapi. Sehingga pengawasan internal aktual terhadap manajemen risiko akan lebih efektif jika RMC yang dimiliki oleh perusahaan semakin sempurna bentuknya. Terlebih lagi RMC yang sifatnya independen akan memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan RMC yang masih tergabung dengan komite lain, karena akan membuka peluang bagi anggota untuk lebih terfokus pada berbagai proses dan laporan risiko. Fungsi dewan direksi maupun komite menjadi lebih baik (Alles *et al.*, 2005 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009)

- b. Pembentukan dan pengungkapan RMC dapat memberikan peringatan kepada komitmen dewan terhadap *corporate governance* yang lebih baik. Dengan kata lain, sebuah komite dewan dapat muncul hanya sebagai sinyal bagi dunia luar. Seperti yang dikemukakan oleh (Harrison, 1987), mengingat sulitnya mengamati apa yang sebenarnya dilakukan oleh komite, maka "terdapat kemungkinan bahwa komite pengawasan akan dibentuk untuk menciptakan sebuah kenyataan atau realita yang diharapkan".

Krisis moneter pada tahun 1998 sebagai akibat dari krisis kepercayaan antara penguasa (otoritas moneter) dan pengusaha membawa akibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia, pengalaman pahit yang telah dialami tersebut tentu tidak ingin diulang kembali dimasa – masa mendatang, didasari oleh keinginan untuk melakukan tatakelola

yang baik seiring dengan perkembangan semangat jaman, timbul kebutuhan untuk melaksanakan pengelolaan usaha bank berdasarkan praktek – praktek terbaik dengan berdasarkan pada prinsip TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsible, Independent, Fairness*).

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

CORPORATE GOVERNANCE

2.4.1 Hubungan Proporsi dewan komisaris independen dengan SRMC

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Hanifa dan Cooke (2002) menegaskan, komisaris independen memiliki dua karakteristik yang memungkinkan mereka untuk memenuhi fungsi monitoring mereka. Pertama, independensi mereka dan kedua, fokus mereka untuk menjaga reputasi mereka dalam pasar tenaga kerja eksternal. Sehingga dengan adanya karakteristik tersebut diharapkan komisaris independen bisa mempermudah pelaksanaan pertanggung-jawaban dewan komisaris yang meliputi pengawasan manajemen atas bisnis yang berjalan dan memastikan dijalankannya *Corporate Governance* sebagaimana mestinya oleh perusahaan serta melaporkan hasilnya kepada pemegang saham dalam masa kepengurusannya.

Menurut (Subramaniam, *et al.*, 2009) memprediksikan bahwa komisaris independen lebih cenderung mendorong

pembentukan SRMC karena mereka menganggap SRMC dapat mempermudah pengawasan risiko yang lebih baik pada organisasi atau perusahaan.

H1 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap keberadaan SRMC

2.4.2. Hubungan antara Ukuran Dewan dengan SRMC

Jumlah dewan direksi yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources*. Perspektif fungsi ini memandang dewan sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting. Peran ini sangat berguna mengingat sumber daya yang langka justru dapat menciptakan keuntungan yang kompetitif. Ukuran dewan yang besar menyediakan keberagaman keahlian dari anggota dewan yang akan membantu perusahaan menyediakan sumberdaya kritis dalam mengurangi ketidakpastian lingkungan (Ezat dan El-Masry, 2008). Keberadaan SRMC dapat pula berhubungan dengan ukuran dewan komisaris. Penelitian terdahulu menyimpulkan adanya hubungan positif antara jumlah direksi komisaris dan keberadaan komite audit (Piot, 2004). Dari sini dapat dinyatakan bahwa dewan direksi yang lebih besar cenderung mencakup sumber daya yang lebih banyak. Dengan banyaknya sumber daya yang tersedia, maka akan lebih mudah bagi organisasi untuk membentuk RMC independen.

H2: Ukuran dewan berpengaruh terhadap keberadaan SRMC

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN

2.4.3. Hubungan antara Reputasi Auditor dengan SRMC

Auditor adalah mekanisme kunci pengawasan eksternal dari suatu perusahaan atau organisasi dan akhir-akhir ini auditor semakin serius dalam memperhatikan manajemen risiko. Perusahaan-perusahaan audit pada umumnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem pengendalian internal mereka dengan membuat rekomendasi pasca-audit tentang peningkatan atau perbaikan desain sistem dimaksud. Perusahaan audit kelompok *Big Four* telah terbukti mendorong dibentuknya mekanisme pengawasan internal yang lebih berkualitas diantara para klien mereka (Cohen *et al.*, 2004). Dari sini diharapkan bahwa akan muncul tekanan yang lebih besar pada organisasi dengan perusahaan *Big Four* untuk membentuk SRMC. Memiliki SRMC berarti pula memiliki pendukung tambahan pada saat sebuah perusahaan audit sedang berada dalam proses penilaian sistem pengawasan risiko internal, yang pada gilirannya cenderung mengurangi kerugian reputasi yang disebabkan oleh kegagalan audit.

H3 : Reputasi auditor berpengaruh terhadap keberadaan SRMC

2.4.4. Hubungan antara Kompleksitas Perusahaan dengan SRMC

Secara umum, kompleksitas organisasi dapat dikatakan bertambah jika segmen bisnisnya bertambah pula (Carcello *et al.*, 2005). Organisasi-organisasi yang memiliki jumlah segmen bisnis yang lebih

banyak memiliki garis produksi, departemen atau strategi pemasaran yang lebih banyak. Akibatnya, risiko akan semakin kompleks. Dengan kondisi ini diharapkan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan akan lebih cenderung memiliki SRMC untuk menanggulangi segala risiko yang ada. (Subramaniam, *et al.*, 2009)

H4 : Kompleksitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan SRMC.

2.4.5. Hubungan antara Risiko Pelaporan Keuangan SRMC

Perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi aset yang lebih banyak dalam bentuk akun laba (*accounts receivable*) dan inventaris dinilai memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih besar dikarenakan oleh tingginya tingkat ketidakpastian di dalam data akuntansi (Korosec dan Horvat, 2005). Pembentukan RMC dan khususnya SRMC, akan dapat menampung penilaian risiko yang lebih baik.

H5: Risiko pelaporan keuangan berpengaruh terhadap keberadaan SRMC

2.4.6. Hubungan antara Leverage dengan SRMC

Perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi liabilitas jangka-panjang lebih besar memiliki risiko keuangan yang lebih besar (Goodwin dan Kent, 2006). Perusahaan yang memiliki leverage tinggi lebih cenderung memiliki risiko *going concern* yang lebih tinggi (Subramaniam, *et al.*, 2009). Kreditor sebagai pihak pemberi

pinjaman lebih cenderung menuntut pengendalian internal yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang ketat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tuntutan yang lebih besar bagi perusahaan untuk memiliki RMC. RMC independen dapat berfungsi secara lebih efektif dalam pengawasan risiko.

H6: Leverage berpengaruh positif terhadap keberadaan SRMC

2.4.7. Hubungan antara Ukuran Perusahaan (Size) dengan SRMC

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggungjawab perusahaan kepada para *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu semakin besar perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan risiko informasi (KPMG, 2001). Kesimpulannya perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk RMC yang bertujuan mengawasi berbagai risiko. RMC yang independen dinilai lebih efektif dalam pengawasan risiko.

H7 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap keberadaan SRMC.

METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypotheses testing*) yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Tipe hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah kausalitas yaitu tipe hubungan sebab akibat.

4.2. Populasi dan Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2011. Pengumpulan sampel, menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan *mandatory* lengkap.
2. Perusahaan non perbankan.
3. Perusahaan yang mempunyai SRMC.
4. Perusahaan memiliki kelengkapan data atas variabel penelitian.

4.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data untuk menentukan variable dependen dan variabel independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan tahun 2009 dan 2011, yang telah dikumpulkan oleh pihak tertentu, atau oleh lembaga pengumpul data yaitu Indonesia Capital Market Directory (ICMD), atau website resmi BEI.

4.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini berupa *Annual Report* perusahaan. Sedangkan data mengenai teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu diperoleh dari studi pustaka (literatur) yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan.

4.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.1
Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Skala
I.	Dependen / Terikat		
	Keberadaan SRMC	variabel <i>dummy</i> dimana 1 = Perusahaan mengungkapkan keberadaan SRMC dan 0 = tidak terdapat SRMC (Subramaniam, <i>et</i>	Nominal

		<i>al.</i> , 2009).	
2.	Independent / Bebas		
	1. INDEP / Proporsi Dewan Komisaris independen	Presentase jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Subramaniam, <i>et al.</i> , 2009).	Rasio
	2.. BSIZE / Ukuran dewan	Menjumlahkan seluruh anggota dewan komisaris (Subramaniam, <i>et al.</i> , 2009).	Nominal
	3. BIGFOUR / Reputasi Auditor	variabel <i>dummy</i> 1 = anggota KAP Big Four dan 0 = bukan anggota KAP Big Four. (Subramaniam, <i>et al.</i> , 2009).	Nominal
	4.BUSSEGMENT / Kompleksitas Perusahaan	Jumlah unit bisnis yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, <i>et al.</i> , 2009).	Nominal
	5.RISK / Risiko Pelaporan Keuangan	Membagi total piutang dan persediaan dengan asset yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, <i>et al.</i> , 2009).	Rasio
	6. LEV / Leverage	Total hutang dibagi total asset persh (Carson, 2002)	Rasio
	7. SIZE / Ukuran Perusahaan	Dengan menghitung log normal total asset yang dimiliki perusahaan (Chen, <i>et al.</i> 2009)	Nominal.

Sumber : Data sekunder, diolah.

4.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan untuk menguji hipotesis menggunakan multivariate dengan *logistic regression*.

4.7. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara multivariate dengan menggunakan *logistic regression* karena variabel bebasnya kombinasi antara

$$\text{Logit SRMC} = \beta_0 + \beta_1 \text{INDEP} + \beta_2 \text{BSIZE} + \beta_3 \text{BIGFOUR} + \beta_4 \text{BUSSEGMENT} + \beta_5 \text{RISK} + \beta_6 \text{LEV} + \beta_7 \text{SIZE} + \varepsilon$$

metrik dan nominal (*non-metric*) (Imam Gozali, 2005). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada *significant p-value (profitabilitas value)* jika *p-value (signifikan) > α*, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value < α*, maka hipotesis diterima.

a. Menguji Koefisien Regresi Logistics

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pembahasan dapat dilihat tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
SRMC

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	206	80.8	80.8	80.8
1	49	19.2	19.2	100.0
Total	255	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olah data (2013)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel adalah perusahaan yang tidak mempunyai RMC independen yaitu sebanyak 206 perusahaan

atau 80,8 persen dan hanya 49 atau 19,2 persen saja perusahaan yang mempunyai RMC independen.

Sedangkan hasil perhitungan Regresi Logistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Table 2
Tabel Koefisien

	B	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a INDEP	-0,250	0,900	0,778
BSIZE	0,189	0,037	1.208
BIGFOUR	0,048	0,898	1.049
BUSSEGMENT	-0,072	0,495	0,931
RISK	0,659	0,305	1.933
LEVERAGE	0,351	0,669	1.421
LnSIZE	0,417	0,001	1.518
Constant	-8,503	0,000	0,000

Sumber : data sekunder (diolah)

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Risk Management Comitte Independen (SRMC)*

Hasil pengujian *logistic regression* terhadap hipotesis 1 (a) seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh **negatif tidak signifikan** terhadap SRMC. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak dapat menentukan keberadaan SRMC. Variabel proporsi dewan komisaris independen mempunyai tanda (*sign*) tidak

sesuai dengan logika teori. Dalam hipotesisnya mempunyai arah positif tetapi hasil dari *logistic regression* mempunyai arah negatif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Carson (2002) dan Subramaniam, et al. (2009). Tidak adanya hubungan ini dikarenakan kualitas dan latar belakang pendidikan anggota dewan

komisaris lebih menentukan kualitas fungsi pengawasan dewan dibandingkan komposisi dan tingkat independensinya (Carson, 2002). Alasan lain yang mungkin adalah pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance*. Selanjutnya, Veronica dan Utama (2005) dalam Kartika (2009) juga menyatakan bahwa ketentuan minimum komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris, khususnya tentang pembentukan komite baru.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap SRMC

Pengujian hipotesis 2 adalah untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap SRMC. Dari hasil pengujian dengan *logistic regression* menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh **positif signifikan** terhadap SRMC. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dapat menentukan keberadaan SRMC.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Subramaniam, *et al.* (2009), Chen, *et al.* (2009), dan Carson (2002) menyatakan bahwa ukuran dewan berhubungan signifikan terhadap terbentuknya komite baru. Ukuran dewan yang besar menjamin terbentuknya komite baru secara sukarela. Dengan makin besarnya ukuran dewan, tugas pengawasan dan *risk monitoring* harus

dilakukan, sehingga tekanan untuk membentuk SRMC semakin besar.

Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap SRMC

Pengujian hipotesis ketiga menguji pengaruh reputasi auditor terhadap SRMC. Dari hasil pengujian dengan *logistic regression* menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh **positif tidak signifikan** terhadap SRMC. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak dapat menentukan keberadaan SRMC.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (Chen, *et al.*, 2009; Carson, 2002) dan sama arahnya dengan Firth dan Rui (2006) yang menyatakan bahwa pembentukan komite audit secara signifikan berhubungan negatif dengan auditor *Big Five*. Alasan yang mungkin mendasari adalah perusahaan cenderung menggunakan auditor eksternal *Big Four* hanya untuk menaikkan reputasinya semata. Auditor *Big Four* hanya menyarankan klien mereka untuk memperhatikan pengawasan risiko yang bersifat keuangan saja.

Pengaruh Kompleksitas Bisnis Perusahaan Terhadap SRMC

Pengujian hipotesis keempat mengenai pengaruh kompleksitas bisnis perusahaan terhadap SRMC. Dari hasil pengujian dengan *logistic regression* menunjukkan bahwa kompleksitas bisnis perusahaan **tidak berpengaruh signifikan** terhadap SRMC. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas bisnis perusahaan tidak dapat menentukan keberadaan SRMC.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Subramaniam, *et al.* (2009) menyatakan bahwa variabel kompleksitas tidak berhubungan secara signifikan dengan keberadaan SRMC. Alasan yang mungkin mendasari adalah penelitian ini masih menggunakan *proxy* pengukuran yang sama dengan penelitian Subramaniam, *et al.* (2009). Jumlah segmen usaha merupakan *proxy* pengukuran yang kurang tepat untuk variabel kompleksitas (Subramaniam, *et al.*, 2009). Jumlah segmen usaha yang beragam tidak menjamin semakin kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan yang hanya bergerak dalam satu segmen usaha, mungkin saja memiliki segmen geografis yang tersebar luas. Hal ini pun juga dapat mengakibatkan makin kompleksnya risiko yang dihadapi perusahaan.

Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan Terhadap SRMC

Pengujian hipotesis kelima mengenai pengaruh risiko pelaporan keuangan terhadap keberadaan SRMC. Dari hasil pengujian dengan *logistic regression* menunjukkan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh **positif tidak signifikan** terhadap keberadaan SRMC. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pelaporan keuangan tidak dapat menentukan keberadaan SRMC. Variabel risiko pelaporan keuangan mempunyai tanda (*sign*) positif sesuai dengan logika teori.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Subramaniam, *et al.*, (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan SRMC secara signifikan berhubungan positif

dengan risiko pelaporan keuangan. Alasan yang mungkin mendasari adalah komite audit dan auditor internal perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding SRMC dalam memastikan informasi keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Auditor internal bertanggung jawab untuk memastikan pengendalian di setiap kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan, termasuk penilaian piutang dan persediaan.

Pengaruh Leverage Terhadap SRMC

Pengujian hipotesis keenam mengenai pengaruh *leverage* terhadap keberadaan RMC dan SRMC. *Leverage* dalam penelitian **tidak berpengaruh signifikan** terhadap SRMC. Artinya bahwa *leverage* tidak mempengaruhi keberadaan SRMC dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Subramaniam, *et al.* (2009). Subramaniam, *et al.* (2009) menemukan bahwa *leverage* tidak berhubungan secara signifikan dengan pembentukan SRMC secara sukarela. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan hutang tinggi cenderung hati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Semakin tinggi proporsi hutang yang harus ditanggung, semakin perusahaan berusaha mengurangi aktivitas yang sifatnya tidak optimal (Jensen, 1986 dalam Chen, *et al.*, 2009).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap SRMC

Pengujian hipotesis ketujuh mengenai pengaruh ukuran perusahaan

terhadap keberadaan SRMC. Ukuran perusahaan dalam penelitian mempunyai pengaruh **positif signifikan** terhadap SRMC. Artinya bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi keberadaan SRMC dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chen, *et al.* (2009), menyatakan bahwa pembentukan komite audit secara sukarela berhubungan positif dengan ukuran perusahaan dan penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa pembentukan RMC yang terpisah (SRMC) berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Chen, *et al.* (2009) menyatakan perusahaan besar cenderung untuk lebih memperhatikan penerapan *good corporate governance* untuk menjaga nama baiknya (*good image*). Hal ini mengakibatkan dorongan untuk membentuk komite baru semakin besar. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada perusahaan *go public* Indonesia, ukuran perusahaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan RMC yang terpisah secara sukarela. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada kondisi Indonesia, RMC terpisah akan lebih banyak dibentuk oleh perusahaan dengan biaya agensi lebih tinggi, di mana *economic of scale* juga cenderung tinggi.

P E N U T U P

Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris,

reputasi auditor, kompleksitas perusahaan, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap keberadaan *Risk Management Comitte* independen (SRMC) pada perusahaan-perusahaan non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Adapun hasil penelitian secara ringkas dapat dijabarkan berikut :

- a. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap SRMC, pada perusahaan-perusahaan non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen , Reputasi auditor, Resiko Pelaporan Keuangan, kompleksitas perusahaan, *leverage* tidak berpengaruh terhadap keberadaan SRMC pada perusahaan-perusahaan non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan SRMC pada perusahaan-perusahaan non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.

Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang memungkinkan dapat menimbulkan gangguan pada hasil analisis yaitu : Dalam perkembangan RMC di Indonesia, masih sedikit perusahaan non perbankan yang mengungkapkan keberadaan SRMC secara jelas. Informasi RMC hanya diperoleh dalam laporan *corporate*

governance dan laporan komite audit dalam laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini dinilai kurang luas jika dibandingkan sampel yang digunakan Subramaniam, *et al* (2009). Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan nonperbankan sementara sampel dalam penelitian Subramaniam, *et al* (2009), lebih bersifat multi industri. Periode penelitian relatif pendek hanya 3 tahun yaitu 2009-2011.

Adanya keterbatasan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk

penelitian selanjutnya adalah : Penambahan jangka waktu penelitian, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang tentang keberadaan RMC dan SRMC di perusahaan. Sampel penelitian yang lebih luas yang bersifat multi industri. Penambahan variabel dalam penelitian, menambahkan variabel dari kondisi internal perusahaan selain yang sudah digunakan dalam penelitian disini seperti latar belakang pendidikan anggota komisaris dan konsentrasi kepemilikan (Ruigrok, *et al.*,2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Alles, M.G., Datar, S.M. and Friedland, J.H. (2005), "Governance-linked D&O coverage: leveraging the audit committee to manage governance risk", *International Journal of Disclose and Governance*, Vol. 2 No. 2, pp. 114-29.
- Andalan, Ratnawati (2012), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komite Manajemen Risiko (Risk Managemen Committee) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Perbankan Yang Listing di BEI), *Media Ekonomi dan Manajemen* ISSN 0854-1442, Volume 26 No. 2 Edisi Juli 2012
- Benz, M. and Frey, B.S. (2007), "Corporate governance: what can we learn from public governance?", *Academy of Management Review*, Vol. 32 No. 1, pp. 92-104.
- Carcello, J.V., Hermanson, D.R. and Raghunandan, K. (2005), "Factors associated with US public companies' investment in internal auditing", *Accounting Horizons*, Vol. 19 No. 2, pp. 69-84.
- Carson, E. (2002), "Factors associated with the development of board sub-committees", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 10 No. 1, pp. 4-18.
- Chau, G. and Leung, P. (2006), "The impact of board composition and family ownership on audit committee formation: evidence from Hong Kong", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 15, p. 1.
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G. and Wright, A. (2004), "The corporate governance mosaic and financial reporting quality", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 23, pp. 87-152.
- Ezat, El-Masry. (2008). "The Impact of Corporate Governance on the Timeliness of Corporate Internet Reporting by Egyptian listed Company". *Managerial Finance*, Vol. 34 No. 12, pp.848-867
- Ghozali, Imam, (2005), "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS", Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodwin, J. and Kent, P. (2006), "The use of internal audit by Australian companies", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 1, pp. 81-101.
- Haniffa, R,M dan TE Cooke, 2005, " The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting ", *Journal of Accounting and Public, Policy*, pp.391-430.
- Korosec, B. and Horvat, R. (2005), "Risk reporting in corporate annual reports", *Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe*, Vol. 7 No. 3, p. 217.
- KPMG (2005), "Strategic Risk Management Survey: A Survey of Contemporary Strategic Risk Management Practices in Australia and New Zealand", KPMG.

- Peraturan Bank Indonesia, No. 5/8/PBI/2003, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia, No. 13/23/PBI/20011, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.
- Piot, C. (2004), “The existence and independence of audit committee in France”, *Accounting and Business Research*, Vol. 34 No. 3, p. 223.
- Putri Andarini, (2010) “Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee* (RMC) Pada Perusahaan *Go Publik* Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Ruigrok, W., Peck, S., Tacheva, S., Greve, P. and Hu, Y. (2006), “The determinants and effects of board nomination committees”, *Journal of Management Governance*, Vol. 10, pp. 119-48.
- Subramaniam, Nava, L McManus, and Jiani Zhang (2009), “Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee formation in Australia Companies “. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 4, pp. 316-339.
- Suripto, B., (2006). “Pengaruh Besaran, Profitabilitas, Pemilikan Saham oleh Publik, dan Kelompok Industri terhadap Tingkat Pengungkapan Keuangan di *Website*”. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* 5 (1).pp.1-26
- Wild, John, 2005, “General Accounting, Tranlating” Penerbit Penada Media group Jakarta..